

HEGEMONI, KEKUASAAN, DAN GERAKAN MAHASISWA ERA 1990-AN: PERSPEKTIF DAN ANALISA

Oleh: Mohammad Maiwan*

ABSTRACT

The student movement that emerged in the 1990s was a response to the authoritarian New Order policies. Although New Order succeeded in economic development but lead to inequality. Student activists form an alliance with pro-democracy groups such as NGOs, unions, farmers, and critical opposition groups. Therefore, their movements become an important part of the pro-democracy movement. In general the issues presented students are: First, the issues of democratization and human rights. Secondly, issues related to land, environment and labor. In addition to address issues of local and national, their movements also a response of international issues To control the student movement, the government established the SMTP (Student Senate Higher Education), accompanied by harsh measures. Nevertheless, their movement is still weak and disunited. The existence of a strong student movement and spread emerge when the economic crisis hit Indonesia, dropping of President Soeharto in May 1998.

Keywords: Student movement, politics, New Order, 1990s-era.

Pendahuluan

Gerakan mahasiswa merupakan salah satu kekuatan penting yang ikut memberikan arah pada kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi aktivisme mahasiswa di negara ini hakikatnya telah jauh berkembang seiring dengan proses pembentukan negara bangsa. Seperti gerakan mahasiswa di beberapa negara berkembang lain, khususnya Asia Tenggara, gerakan mahasiswa tercatat sebagai bagian dari gerakan menuntut kemerdekaan ataupun pencetus utama protes-protes massa menjatuhkan rejim

otoriter. Pengalaman Indonesia, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru menunjukkan bagaimana resistensi golongan aktivis mahasiswa —dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki— secara gigih menentang kebijakan-kebijakan yang menindas.

Dalam konteks ini gerakan mahasiswa menjadi bagian dari gerakan sosial, yang secara esensial merepresentasikan, apa yang oleh Goodwin & Jasper (2009: 3) disebut sebagai, “kesadaran, konsen, dan usaha-usaha untuk menjaga kesinambungan gerakan

*Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

masyarakat dalam merubah berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan cara-cara yang ekstra institusional". Kajian-kajian yang dilakukan sejumlah pakar belakangan terhadap gerakan-gerakan mahasiswa seperti; Weiss (2011); Aspinall (2012); Wright (2014); Davis (2015); Rowen (2015) dan sejenisnya membantah dengan tegas asumsi-asumsi yang bersifat material, kultural, psikologis, maupun politis yang selama ini menjadi pencetus gerakan mahasiswa. Karena itu, dalam pandangan mereka gerakan mahasiswa bukan hanya fenomena masyarakat berkembang tetapi juga moderen, post material, dan pasca historis. Keberanian mahasiswa untuk melawan kekuasaan bukan hanya dituntun oleh aspirasi-aspirasi moral, tetapi juga memperoleh inspirasi lokal, dan juga fenomena global. Medan pertarungan mahasiswa dengan penguasa tidaklah semata-mata dapat dipahami secara linear dan lokal (nasional) saja, tetapi juga transhistoris, kontekstual dan multi kompleks (Weiss 2011: 4-6). Berdasarkan pandangan tersebut artikel ini akan menguraikan dan menganalisis gerakan mahasiswa Indonesia pada era 1990-an. Bagaimana dinamika gerakan mereka, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Serta bagaimana respon penguasa terhadapnya?

Lanskap Gerakan Mahasiswa 1990-An

Gerakan mahasiswa yang muncul pada era 1990-an merupakan fenomena sosial yang harus dilihat dalam konteks kedudukan rejim Orde Baru yang kuat. Selama periode ini pemerintah meraih keberhasilan pembangunan ekonomi maupun politik, baik pada level domestik maupun internasional, yang membawa perubahan-perubahan penting dalam kehidupan masyarakat. Sepanjang dekade tersebut Orde Baru secara nyata berhasil mengkombinasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pengurangan kadar kemiskinan absolut secara langsung yang dibarengi dengan pencapaian stabilitas politik. Namun demikian, realitanya ekonomi Indonesia semakin terpusat di tangan kelompok-kelompok tertentu, yakni, sejumlah konglomerat. Mereka kebanyakannya adalah, etnik Cina, yang berkolaborasi (kolusi) dengan elite politik yang berkuasa.

Sementara penyelenggaraan kekuasaan ditandai wujudnya kekuasaan yang semakin terpusat. Pada peringkat elite berlaku penyelenggaraan kekuasaan yang bercorak kolusif, disertai meluasnya korupsi, kolusi dan nepotisme yang menghasilkan berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang menindas. Keadaan

tersebut memunculkan kritikan dalam bentuk tuntutan pembangunan yang berkeadilan, yang untuk sebagian disuarakan kalangan aktivis mahasiswa.

Sepanjang dekade 1990-an gerakan mahasiswa mengalami perkembangan baru yang lebih dinamik dibandingkan dengan dekade sebelumnya, yakni 1980-an. Gerakan mereka, muncul kembali pada tahun 1991 dalam bentuk protes-protes pada pemerintah. Gerakan protes ini menggantikan bentuk-bentuk aktivisme mahasiswa yang lain, seperti kelompok-kelompok diskusi yang dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab permasalahan. Karena itu, kalangan aktivis mahasiswa kemudian memperluas sokongan dengan melakukan aliansi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, seperti: NGO, pers dan buruh. Gerakan mereka kemudian menjadi bagian penting dari gerakan prodemokrasi pada saat itu (Uhlen 1998: 114). Pada tahap ini gerakan mahasiswa mengalami pergeseran dari sifat elitisme kepada populisme (Sanit 1999: 163-194).

Aliansi bersama rakyat ini sekaligus menempatkan aktivis mahasiswa secara tidak resmi sebagai “juru bicara” masyarakat. Pilihan ini diambil sebagai konsekuensi kegagalan gerakan mereka pada penghujung tahun 1980-an yang

dinilai lembek. Di samping melakukan aliansi dengan NGO, aktivis mahasiswa juga melakukan aliansi dengan kelompok-kelompok prodemokrasi yang lain seperti: Kelompok Petisi 50, Forum Demokrasi, serta organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan Islam. Aliansi dengan kelompok-kelompok oposisi yang berbeda ini dilakukan untuk saling mendukung tujuan mereka. Para mahasiswa sering mengundang para aktivis Petisi 50, beberapa akademisi kritis, serta para pemimpin NGO untuk berpartisipasi dalam acara-acara seminar ataupun meletakkan nama-nama mereka dalam petisi-petisi mahasiswa (Aspinall 1993: 40).

Selain itu, para aktivis mahasiswa sesekali terkadang berdiri sebagai aktor di depan, memprotes berbagai pelanggaran pihak pemerintah seperti: Penyerobotan tanah, pencemaran lingkungan, korupsi, penindasan petani, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan lain-lain. Secara umum, isu-isu yang diangkat mahasiswa ada dua. *Pertama*, ialah isu demokratisasi dan hak asasi manusia. Isu ini lebih berkaitan dengan masalah perubahan politik, terciptanya kebebasan, tegaknya hukum, kebebasan berserikat, serta terciptanya pemerintahan yang bersih. *Kedua*, ialah isu yang berkait erat dengan permasalahan tanah, lingkungan dan perburuhan. Isu ini

lebih menyangkut kepentingan rakyat lapisan bawah, khususnya masyarakat marjinal di perkotaan dan para petani di perdesaan yang seringkali menjadi korban pembangunan (Naipospos 1996: 32). Dalam kaitan ini, aktivitas-aktivitas protes mahasiswa sering disertai dengan pembentukan berbagai komisi *ad hoc*, yang menjalankan fungsi pembelaan dalam masyarakat.

Meningkatnya Protes-Protes

Salah satu tindakan protes awal mahasiswa yang agak besar pada periode ini adalah yang terjadi pada awal bulan Desember 1991, ketika para mahasiswa memperingati hari Hak Asasi Manusia se-Dunia. Dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa dari berbagai lembaga pendidikan tinggi, secara terpisah-pisah melancarkan protesnya terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Mahasiswa mengkritik pemerintah karena dianggap gagal memberikan perlindungan hak-hak kepada warganya. Lemahnya penegakan hukum dan buruknya cara kerja pegawai pemerintah menjadi salah satu sebab adanya berbagai pelanggaran dalam masyarakat.

Selanjutnya, sejalan dengan meningkatnya iklim politik dalam negara menjelang pemilihan umum 1992, protes-

protes mahasiswa semakin meningkat. Protes mereka menyentuh pada aspek-aspek politik yang berhubungan dengan isu-isu pemilihan umum. Mahasiswa mengajak masyarakat bersikap kritis, seraya meragukan ketulusan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum secara adil dan jujur. Berdasarkan realitas itu, sebagian aktivis mahasiswa di beberapa universitas secara bersemangat mengajak kepada masyarakat untuk melakukan tindakan golput sebagai tanda boikot kepada pelaksanaan pemilihan umum.

Setelah pemilihan umum selesai, beberapa protes mahasiswa tetap terjadi, terutama menjelang sidang umum MPR pada bulan Maret 1993 yang akan memilih presiden dan wakil presiden. Tema yang diangkat para aktivis mahasiswa adalah pencalonan presiden, di mana mereka mendesak partai-partai politik agar mengajukan calon alternatif di luar Soeharto. Pada awal bulan Januari 1993 pada saat berlangsung pertemuan pimpinan partai PDI di Kopo Bogor, para mahasiswa atas nama organisasi Aliansi Demokrasi Rakyat mendesak PDI agar mewujudkan janji-janjinya dalam Pemilihan Umum 1992, yaitu, mengajukan satu calon presiden alternatif (Aspinall 1995: 37).

Bahkan sebelumnya, yaitu, pada bulan November 1992 dalam musyawarah

Forum Aktivitas Lembaga Mahasiswa di Bandung yang diikuti 26 pimpinan senat mahasiswa se-Jawa yang diselenggarakan di ITB, para pimpinan mahasiswa mengusulkan masalah calon alternatif selain Presiden Soeharto dan pembatasan masa jabatan presiden (Tempo, 28 November 1992: 31-32). Mahasiswa menantang para elite politik untuk serius membuat satu terobosan politik melalui regenerasi kepemimpinan nasional. Inilah untuk pertama kalinya mahasiswa secara terbuka berani mempersoalkan jabatan kepresidenan, mengingat topik tersebut selama ini dianggap sensitif, khususnya sejak penumpasan gerakan mahasiswa tahun 1978. Pada kenyataannya para politisi tidak begitu serius memberi respon terhadap aspirasi mahasiswa, sehingga Soeharto terpilih kembali sebagai presiden secara aklamasi. Harapan akan adanya satu perubahan dalam jangka pendek agaknya sia-sia.

Dalam konteks inilah, mahasiswa tetap melancarkan kritik-kritiknya, menumpahkan kemarahannya, seraya menjadikan pribadi Presiden Soeharto sebagai sasaran serangan berikutnya. Contoh dari tindakan berani ini adalah yang dilakukan para aktivis mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Jawa yang tergabung dalam jaringan Front Aksi Mahasiswa

Indonesia (FAMI) (Uhlin 1998: 132), di mana pada tanggal 14 Desember 1993 sekitar 200 aktivis FAMI berdemonstrasi di depan gedung DPR. Mereka menuntut diakhirinya “pendekatan keamanan” dan meminta agar diadakan Sidang Istimewa MPR untuk menyeret Presiden Soeharto yang dianggap bertanggungjawab terhadap berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Gerakan mereka dibubarkan secara kasar oleh pihak keamanan dan 21 orang aktivisnya dipenjara antara delapan hingga empat belas bulan (Uhlin 1998: 111).

Namun hukuman semacam itu tidaklah membuat sebagian mahasiswa kapok. Aksi yang sama berlaku kembali, ketika pada awal bulan Januari 1994 segolongan kecil mahasiswa Front Aksi Pemuda Indonesia (FAPI), berdemonstrasi di depan gedung DPR. Mereka kemudian bermaksud memasuki gedung untuk menemui Ketua MPR/DPR Wahono. Para pemrotes membentangkan poster-poster yang menuntut perbaikan hak asasi manusia, kesenjangan ekonomi, mengkritik wakil rakyat serta pemerintah dan menuntut pembebasan dua puluh satu rekan-rekan mereka yang ditahan dalam demonstrasi 14 Desember 1993 sebelumnya. Akibat adanya protes tersebut beberapa orang mahasiswa ditangkap dan ditahan selama

dua hari (Forum Keadilan, 3 Februari 1994: 10).

Meskipun terus berhadapan dengan tekanan, pada tahap tertentu gerakan mahasiswa terkadang berhasil mendesak rejim untuk bersifat akomodatif. Salah satu tindakan mahasiswa yang berhasil adalah aktivitas protes antiSDSB. Protes yang dilancarkan mahasiswa bersama berbagai kelompok masyarakat tersebut dilakukan sepanjang akhir tahun 1991 dan juga secara berangkai dalam tahun-tahun berikutnya. Dalam protes tersebut, aktivis mahasiswa berhasil menghimpun massa, baik dari mahasiswa maupun masyarakat sendiri untuk melakukan tindakan protes di jalan-jalan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Protes antiSDSB kemudian berkembang menjadi gerakan nasional.

Selain isu SDSB, aksi lain mahasiswa yang menonjol pada saat itu yang berhasil diakomodasi pemerintah adalah kasus pelarangan jilbab di sekolah-sekolah maupun pembatasan jilbab pada universitas-universitas. Serangkaian demonstrasi para mahasiswa Muslim dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah-sekolah terjadi di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan kota-kota lain pada bulan November dan Desember 1990. Di samping melakukan protes-protes di universitas, mahasiswa juga mendatangi kantor

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Perwakilan Rakyat, serta menyelenggarakan acara bertajuk, Tabligh Akbar Lautan Jilbab. Para aktivis mahasiswa Muslim menuntut agar pemerintah mencabut ketentuan pembatasan penggunaan pakaian Muslim pada sekolah-sekolah maupun universitas yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama. Desakan kuat para mahasiswa dan berbagai pihak, akhirnya diterima ketika pada tanggal 16 Februari 1991 pemerintah memberi respon secara positif dengan kebijakan baru, yang membolehkan penggunaan jilbab pada sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi (Media Dakwah, Januari 1991: 42-45).

Pada kalangan mahasiswa, khususnya aktivis mahasiswa Muslim Indonesia, demonstrasi marak kembali pada pertengahan 1995 dalam bentuk aktivitas solidaritas di beberapa kota, yang memprotes perusakan mesjid dan penganiayaan atas umat Islam di Propinsi Timor-Timur dan Flores Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua insiden tersebut terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Mahasiswa meminta pemerintah bertindak tegas kepada para perusuh dan mengembalikan semula keamanan di kedua-dua propinsi tersebut.

Sementara insiden di Flores, berlaku akibat adanya penghinaan atas “roti hostia” pada upacara ibadah misa di Gereja Katolik Larantuka Flores yang kononnya dilakukan seorang Muslim. Akibat kejadian tersebut muncul kemarahan masyarakat yang berujung kepada kerusuhan. Satu buah hotel dan puluhan kedai milik orang-orang Muslim pendatang, khususnya dari etnis Jawa, Minang dan Bugis, dibakar (Media Dakwah, Juli 1995: 11-17).

Pada dimensi yang lebih luas, yaitu, internasional, protes mahasiswa dengan isu agama muncul dalam rangka solidaritas atas nasib umat Islam di Bosnia dan Chechnya. Sejumlah protes-protes mahasiswa yang pernah muncul pada pertengahan tahun 1993 serta 1994, meletus kembali secara luas pada bulan Agustus dan September 1995 akibat jatuhnya zona aman di bawah PBB, yaitu, Sebrenica dan Zepa di Bosnia. Gerakan protes mahasiswa dalam rangka perjuangan di Bosnia maupun Chechnya berkembang secara luas di berbagai universitas. Para mahasiswa, bersama sejumlah tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi sosial Islam mendesak dunia Islam dan pemerintah Indonesia untuk lebih serius dan bertindak nyata membela hak-hak kaum Muslim di sana. Hal ini menjadi bagian dari “kesadaran politik religious” kalangan

muda Muslim (Weiss 2011:56). Para aktivis mahasiswa menyebut tragedi Bosnia yang telah terjadi sejak tahun 1992 sebagai wujud konspirasi Barat untuk melenyapkan Islam dari bumi Eropa. Bahkan, tokoh cendekiawan Muslim yang dekat dengan kalangan mahasiswa, yaitu, Amien Rais, menyebut tragedi Bosnia yang berlarut-larut sebagai “lelucon internasional” yang mempertontonkan wajah munafik Barat (Media Dakwah, September 1995: 11-12).

Selain isu-isu sosial dan politik nasional maupun internasional seperti di atas, mahasiswa secara terus menerus juga menyuarkan permasalahan-permasalahan lokal agar memperoleh perhatian umum untuk diangkat menjadi isu nasional. Sejak bulan Mei sehingga bulan Juli 1993 terjadi rangkaian protes-protes mahasiswa yang beragam di beberapa daerah. Di Semarang dan Salatiga, Jawa Tengah, terjadi protes menyangkut persidangan kasus Golongan Putih, kemudian disertai isu kalender Tanah Untuk Rakyat (TUR) yang menyebabkan beberapa aktivis ditahan. Di Jakarta, aktivitas-aktivitas protes terjadi di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Universitas Nasional (Unas) menyangkut isu internal universitas yang berakhir dengan tindakan kasar pihak keamanan. Sikap yang lebih kasar ditunjukkan pihak keamanan ketika berhadapan dengan

protes-protes mahasiswa di ISTN (Institut Sains dan Teknologi Nasional) yang berujung pada meletusnya insiden “Subuh Berdarah” di mana serangan pihak keamanan dibalas oleh mahasiswa. Akibat kejadian tersebut puluhan orang mahasiswa ditahan (Editor, 10 Juli 1993: 30).

Insiden lokal lain yang memperoleh respon serta kecaman mahasiswa ialah, tindakan kekerasan tentara terhadap sejumlah petani miskin yang tinggal di lereng Gunung Ceremai Majalengka Jawa Barat, yang dikenal sebagai kasus “Haur Koneng” (bambu kuning). Dalam kejadian itu, para petani yang hidup dalam satu komunitas eksklusif pada lingkungan perdesaan terpencil tersebut dituduh sebagai pengikut aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah (Tempo, 7 Agustus 1993: 39-40).

Salah satu insiden kekerasan yang berhasil menarik perhatian luas adalah, insiden Nipah di Sampang Madura Jawa Timur, yang terjadi pada bulan September 1993 yang mengakibatkan kematian warga setempat. Para mahasiswa bersama kelompok ulama di Surabaya, Yogyakarta dan beberapa kota lain di Jawa Timur melakukan protes dan menuntut agar insiden itu diusut tuntas. Empat puluh ulama dari Jawa Timur mengirimkan surat

kepada Presiden Soeharto, sementara sebagian mahasiswa mendirikan Komite Solidaritas Mahasiswa untuk Waduk Nipah dan melakukan protes kepada DPRD Jawa Timur. Mahasiswa mendesak pihak keamanan agar bertindak persuasif, dan menghindari cara-cara kekerasan (Forum Keadilan, 28 Oktober 1993: 9-10).

Penentangan mahasiswa bukan saja terjadi di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Salah satunya adalah di Lampung. Para mahasiswa beberapa universitas seperti: Universitas Lampung (Unila) dan UBL (Universitas Kota Lampung) beberapa kali terlibat dalam aktivitas solidaritas dan usaha-usaha membela petani di daerah setempat. Mereka memprotes masalah pencemaran lingkungan, pembabatan hutan, pelacuran, kekerasan tentara, penyerobotan tanah dan lain-lain. Kedekatannya dengan wilayah Jawa dan Jakarta khususnya, menjadikan interaksi mahasiswa dari Propinsi Lampung dengan mahasiswa Pulau Jawa berlangsung lebih lancar dan intensif. Gerakan mahasiswa di Jawa akan dengan cepat menyebar ke propinsi tersebut. Kelompok-kelompok aktivis mahasiswa tumbuh kuat di daerah ini. Bahkan, Lampung juga menjadi satu-satunya basis kuat organisasi mahasiswa radikal, yaitu PRD, di luar Jawa.

Hal sama juga terjadi di Medan, Makassar, Mataram, Denpasar, dan beberapa kota lain dalam skop pengaruh yang lebih kecil. Sebagai contoh, di Medan Sumatera Utara, mahasiswa melakukan protes bersama rakyat dalam beberapa kasus seperti: Masalah buruh, konflik tanah, tindak kekerasan dan juga lingkungan. Salah satu tindakan yang menonjol adalah usaha mahasiswa berkali-kali membela rakyat menuntut penutupan atas perusahaan kertas besar, yaitu, PT Inti Indorayon Utama, di Porsea, Provinsi Sumatera Utara, yang terbukti telah mencemari lingkungan (Kompas, 27 November 1993: 2). Meskipun usaha mereka tidak sepenuhnya berhasil, namun memberikan bukti kepedulian mahasiswa kepada kehidupan masyarakat.

Meningkatnya aktivitas-aktivitas protes mahasiswa tersebut terjadi karena disebabkan beberapa hal. *Pertama* adalah, adanya keterbukaan politik, di mana dalam batas-batas tertentu pemerintah Orde Baru memberikan peluang kebebasan yang lebih besar di tengah masyarakat untuk menyampaikan pandangan politik, termasuklah isu pergantian kepemimpinan nasional. Hal itu muncul seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan pendidikan masyarakat, serta terjadinya gelombang

tuntutan demokratisasi dan hak asasi manusia secara global.

Kedua, meningkatnya perpecahan dan persaingan pada peringkat elite yang berkuasa yang berhujung kepada usaha untuk mencari dukungan dari bawah (akar rumput). Perjuangan di antara kelompok dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi pergantian kepemimpinan nasional --yang meskipun tidak pasti-- dijangka akan berlaku mengingat umur Presiden Soeharto yang sudah tua. Karena itu, pergulatan internal elite ini memberikan dampak nyata, yaitu, membuka peluang bagi adanya kelompok-kelompok politik yang lebih beragam. Mereka mencoba untuk meraih sokongan pada peringkat akar rumput, termasuklah mahasiswa (Aspinall 1995). *Ketiga*, semakin banyaknya permasalahan dalam masyarakat sebagai dampak pembangunan. Meskipun ekonomi meningkat pesat dan pembangunan terjadi di mana-mana, namun justru menimbulkan berbagai masalah dalam bentuk wujudnya dampak-dampak negatif yang merugikan masyarakat kecil ataupun golongan terpinggir. Mereka seperti; para petani, buruh dan penduduk miskin di kota-kota.

Aktivitas protes-protes mahasiswa di atas secara dominan lebih bersifat spontan, sporadis, lebih independen dibandingkan protes mahasiswa tahun 1966

yang didukung tentara. Gerakan mahasiswa pada dekade ini tanpa aktor intelektual, karena memang sistem pendidikan tinggi yang ada saat itu tidak memberikan kesempatan bagi tumbuhnya para pemikir di kalangan mahasiswa. Justru gerakan mahasiswa pada saat itu lebih banyak mengandalkan peranan jaringan (*networker*), yaitu, orang-orang yang bergerak melakukan hubungan antar mahasiswa antar kota. Para pembentuk jaringan ini biasanya adalah bekas aktivis mahasiswa ataupun mahasiswa yang mempunyai kepedulian atas masalah yang timbul. Kebanyakan gerakan mereka bukanlah organisasi formal melainkan forum yang sifatnya lebih dinamik.

Selain melakukan aktivitas protes dan melakukan kerjasama dengan NGO dan kelompok-kelompok prodemokrasi, gerakan mahasiswa juga mengusahakan pembentukan opini penentangan terhadap rejim melalui pers mahasiswa. Sejak pertengahan dekade 1980-an, pers mahasiswa telah berkembang pesat di universitas-universitas (Supriyanto 1998). Pada tahun 1990-an, sebagian pers mahasiswa berani melakukan kritikan kepada pemerintah. Beberapa media mahasiswa yang terkenal kritis di kampus-kampus di antaranya, yaitu: Majalah *Balairung* di Universitas Gadjah Mada,

Politika di Universitas Nasional Jakarta, *Himmah* di Universitas Islam Indonesia, *Arena* di Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, majalah *Opini* di Universitas Diponegoro Semarang.

Namun demikian pemerintah terus berusaha membungkam suara pers mahasiswa. Pada pertengahan 1993, beberapa pers mahasiswa dilarang, seperti: Majalah *Arena* milik mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, majalah OPINI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, majalah *Dialogue* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, majalah *Vokal* IKIP PGRI (Pendidikan Guru Republik Indonesia) Semarang. Tindakan pemerintah ini mengundang respon yang cukup luas pada kalangan aktivis, sehingga muncul beberapa protes dan keprihatinan mahasiswa pada sebagian universitas (Irenewati H. Gayatri 1999: 84-85).

Strategi dan Taktik Rejim

Untuk mencegah meningkatnya aktivitas-aktivitas protes ini, jauh sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah, merombak organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Akibat berlakunya beberapa protes mahasiswa

pada akhir dekade 1980-an dan untuk menggairahkan kembali kehidupan universitas, --yang sejak NKK/BKK diterapkan tahun 1979 menjadi tidak bersemangat, serta memenuhi sebahagian tuntutan mahasiswa dalam menghapus kebijakan NKK/BKK-- maka pada bulan Juli 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 30/1990 tentang Sistem Pendidikan Tinggi yang disertai Surat Keputusan nomor 0457/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK), pemerintah secara resmi mengenalkan ide SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990: 4-6).

Pembentukan institusi ini merupakan bagian dari rancangan pemerintah tentang kebebasan akademik dan pelaksanaan otonomi pengelolaan perguruan tinggi. SMPT didirikan sebagai satu-satunya organisasi intra mahasiswa yang resmi pada peringkat universitas. Organisasi ini bersifat semi independen dengan memberikan otonomi yang agak luas kepada mahasiswa dalam mengelolanya. Pihak pemerintah menyatakan bahwa pendirian SMPT bertujuan mengembalikan independensi mahasiswa di universitas agar mereka menjadi calon pemimpin dan bukan hanya "tukang" pada masa depan. Namun,

kenyataannya ruang gerak mahasiswa masih terbatas. Sebab keberadaan SMPT tidaklah secara otomatis mengikis kebijakan NKK. Di samping itu, institusi baru tersebut juga tidaklah sama seperti Dewan Mahasiswa ataupun *student government* pada masa dahulu. Sebagai organisasi intra universitas, SMPT sesungguhnya menjadi tempat pembinaan kehidupan akademik di kampus. Dengan kata lain, pembentukan SMPT ini hakikatnya merupakan langkah penataan kembali kehidupan mahasiswa pada masa stabil.

Terdapat respon yang berbeda-beda di kalangan mahasiswa di universitas-universitas, sehingga muncul perdebatan. Sebagian besar institusi perguruan tinggi menerima ide SMPT, sementara sebagian lagi menolaknya. Kelompok mahasiswa yang menerima berargumen bahwa lembaga SMPT ini walaupun tidak sepenuhnya memenuhi harapan, namun sudah cukup memadai sebagai sarana mahasiswa beraktivitas di kampus. Di tengah dominasi rezim dan tidak adanya pilihan lain yang lebih baik, maka kehadiran SMPT justru perlu dimanfaatkan secara maksimum dari dalam. Sementara mahasiswa yang menolak ide SMPT melihat bahwa organisasi ini merupakan bagian dari usaha korporatik rejim. SMPT

dianggap tidak independen dan merupakan bentuk lain dari kebijakan NKK. Indikasinya adalah masih memberikan peranan yang besar kepada rektor, serta mahasiswa berpolitik di dalam universitas tetap dilarang. Lembaga SMPT dipandang sebagai mekanisme pemerintah mengontrol mahasiswa dan bukan untuk memperkuat kedudukan mereka di universitas.

Akibat adanya perbedaan-perbedaan di atas, pada beberapa universitas suara aktivis mahasiswa terpecah menjadi dua kelompok, yang berujung kepada konflik secara terbuka. Hal itu seperti terjadi di UGM, di mana terjadi konflik di antara dua kelompok mahasiswa tersebut. Akan tetapi, kemudian terlihat jelas bahwa, ide SMPT adalah sama dengan NKK/BKK karena kedua-duanya merupakan kebijakan pemerintah, agar dapat tetap mengontrol mahasiswa dan bukan bagian dari keterbukaan yang menyeluruh. Usaha keras pemerintah untuk menundukkan institusi perguruan tinggi dan melakukan depolitisasi yang mendalam ini, kemudian diikuti dengan penerapan konsep *link and match* (ketersambungan dan keterpasangan) dalam dunia pendidikan. Gagasan ini dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu, Wardiman Djojonegoro. Khusus kepada lembaga perguruan tinggi, melalui

konsep *link and match* dimaksudkan agar berbagai jurusan di universitas memiliki relevansi kuat dengan bidang industri. Kebijakan ini diterapkan sebagai cara untuk membendung meningkatnya pengangguran di kalangan tamatan perguruan tinggi, khususnya ilmu-ilmu sosial.

Secara praktis ide di atas membawa dampak yang mengarahkan pendidikan tinggi menjadi bagian dari mesin produksi dalam dunia industri. Berdasarkan penerapan konsep *link and match* tersebut, institusi pendidikan secara mutlak mesti menyesuaikan diri pada kehendak pasar. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan penyesuaian kepada berbagai aspek, terutama kurikulum, metode dan sistem pengajaran, serta “kultur akademik” mahasiswa yang lebih akomodatif dan *acceptable*. Konsep *link and match* justru memberikan peluang atas lahirnya individu-individu berpendidikan tinggi yang mirip robot, yang kewujudannya dipandu oleh dunia industri, guna memenuhi tuntutan pasar.

Selain melalui rekonstruksi institusi dan perubahan orientasi pendidikan di universitas, untuk mencegah gerakan mahasiswa, pemerintah juga tidak ragu-ragu menyusupkan intel-intelnya ke dalam universitas untuk memata-matai mahasiswa. Sementara di kalangan

akademisi sendiri, yang seringkali memberikan inspirasi kepada gerakan mahasiswa dan gerakan prodemokrasi secara umum, dikenakan berbagai tindakan pembatasan. Bentuk aktivitas yang seringkali mendapat pengawasan keras adalah izin penelitian, publikasi dan peredaran buku, pementasan teater, serta diskusi, dan seminar di universitas-universitas. Pada bulan Oktober 1994, George Junus Aditjondro, dosen Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga diinterogasi pihak polisi Yogyakarta karena dituduh menghina Presiden Soeharto dalam satu seminar di Universitas Islam Indonesia (UII) pada bulan Agustus tahun itu. Akibat dari tuduhan tersebut ia kemudian kabur ke Australia dan mengajar di Universitas Murdoch.

Kontrol kepada aktivitas-aktivitas akademik dilakukan, karena pemerintah tidak mau universitas-universitas menjadi sarang oposisi. Bahkan kalau perlu, melalui berbagai cara, pemerintah melakukan campur tangan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi terhadap meluasnya sikap kritis itu. Salah satu insiden penting adalah yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Jawa Tengah sejak bulan Mei 1993. Insiden bermula dari pemilihan rektor yang dianggap tidak

demokratis, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik internal antara unsur-unsur demokratik dengan pihak pengelola universitas. Konflik menjadi berlarut-larut dan berujung kepada dikeluarkannya Arief Budiman dan Ariel Heryanto dari universitas pada bulan Oktober 1994. Beliau dituduh sebagai penggerak penentangan.

Meskipun tidak ada bukti kukuh adanya kaitan langsung antara kepentingan rejim dengan usaha-usaha untuk mengikis pengaruh kelompok-kelompok kritis di universitas berkenaan, namun dipercayai bahwa kepentingan pihak yayasan universitas bersesuaian dengan kepentingan negara untuk menyingkirkan tokoh-tokoh kritis di kampus UKSW. Tindakan itu boleh difahami mengingat dalam beberapa waktu sebelumnya, UKSW, melalui Arief Budiman, George Junus Aditjondro, Ariel Heryanto dan satu kelompok intelektual prodemokrasi lainnya, telah berkembang menjadi salah satu sarang tokoh-tokoh yang kritis kepada pemerintah Soeharto.

Pada bagian lain pemerintah semakin keras. Hal itu terbukti, setelah tahun 1994 ketika suasana “keterbukaan politik” secara mendadak ditutup, yang ditandai dengan tindakan pembreidelan pemerintah terhadap sejumlah media, iaitu:

Tempo, *Editor* dan *DeTIK* pada tanggal 21 Juni 1994. Masa ini merupakan tonggak berakhirnya eksperimen Soeharto dengan apa yang diistilahkan oleh Guillermo O'Donnell sebagai "liberalisasi politik terbatas", sekaligus awal dari kebijakan baru yang lebih menindas. Selepas itu, wacana tentang pergantian kepemimpinan nasional (suksesi) dihentikan dan kontrol yang lebih ketat terhadap organisasi masyarakat ataupun NGO dilakukan. Terlihat selepas itu, yakni setelah tahun 1994, gerakan perlawanan mahasiswa semakin menyebar dan menyatu dengan aktivis prodemokrasi lainnya.

Radikalisasi dan Penindasan

Gerakan mahasiswa kemudian mengalami radikalisasi yang ditandai dengan didirikannya Persatuan Rakyat Demokratik pada awal Mei 1994 yang sebelumnya didahului pendirian organisasi-organisasi embrionalnya, yakni: Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) (1992), kemudian disusul Serikat Tani Nasional (STN) (1993), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) (1994), Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker) (1994), Sarekat Rakyat Indonesia (SRI) (1995), Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Rakyat

Maubere (SPRIM) (1995) (Miftahuddin 2004: 78-80).

PRD dipimpin Budiman Sudjatmiko bekas mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dan beranggotakan mahasiswa dari berbagai universitas, beberapa akademisi, buruh dan petani. Organisasi ini berhaluan sosialisme demokrasi. PRD tampil sebagai organisasi kader yang diorganisir secara ketat dan terstruktur dengan disiplin tinggi. Pada bulan Mei 1996 PRD berubah nama menjadi Partai Rakyat Demokratik, sementara organisasi-organisasi jaringannya berfungsi sebagai sayap gerakan. Munculnya organisasi-organisasi radikal tersebut merupakan bentuk kekecewaan sekaligus kritikan tidak langsung kepada berbagai organisasi formal mahasiswa seperti: HMI, PMII, PMKRI, GMNI, GMKI, dan sejenisnya yang dianggap terlalu dekat dengan pemerintah. PRD berusaha untuk menggerakkan massa pada tingkat akar rumput, dengan tema-tema yang langsung dan menantang. Organisasi ini mengkritik Orde Baru sebagai fasis dan totaliter. Akibat dari sikap PRD yang militan, revolusioner, anti tentara dan anti pemerintah itu, rejim meletakkannya ke dalam senarai organisasi prodemokrasi paling radikal dan berbahaya.

Bersamaan dengan bangkitnya kelompok radikal ini, berbagai protes yang dilakukan mahasiswa, petani dan buruh agak meningkat. Bahkan, di beberapa daerah terjadi kerusuhan (Aspinall 2005). Akibat dari terjadinya peningkatan aktivitas-aktivitas protes tersebut, pemerintah memberi respon dengan berbagai cara dan taktik yang lebih keras. Pada awal Maret 1995 di Jakarta, dua aktivis Yayasan Pijar ditangkap, karena membuat buletin *Kabar dari Pijar*, yang isinya dianggap menghasut rakyat agar memusuhi pemerintah dan menghina Presiden. Sementara di Bandung, aktivis NGO Front Penyelamat Pancasila (FPP), yaitu Coky atau Yahya Runasia Tahal Guntur Aritonang ditangkap dengan tuduhan yang hampir sama (Uhlen 1998; 116).

Pada akhir bulan April 1996 berlaku serangkaian demonstrasi mahasiswa dari berbagai universitas di Makassar menentang kenaikan tarif transportasi dalam kota. Demonstrasi yang pada hari-hari sebelumnya berlangsung tertib, pada tanggal 24 April berujung tindak kekerasan. Pihak keamanan yang bermaksud mengontrol keadaan bertindak kasar dengan memukul para pemrotes, memasuki kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan menyerang

mahasiswa. Akibat kejadian tersebut, kurang lebih seratus mahasiswa cedera dan tiga mahasiswa meninggal (Human Rights Watch 1998: 75-76).

Selain menekan mahasiswa dengan cara-cara kekerasan rejim tidak ragu-ragu menggunakan metode tertentu untuk menghancurkan kekuatan mahasiswa dan unsur-unsur prodemokrasi lainnya. Mulai dari pertengahan dekade 1990-an, di tengah dinamika politik yang semakin panas, yang disertai dengan munculnya protes-protes mahasiswa dan buruh, serta kekerasan bersifat etnik dan agama di sejumlah daerah, rejim secara intensif melancarkan kampanye antikomunis. Pemerintah mensifatkannya sebagai Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Namun sesungguhnya, kampanye anti OTB ini dilakukan sebagai *manuver* untuk mencari “kambing hitam” dan stigmatisasi terhadap berbagai peristiwa penentangan yang agak meningkat pada masa itu (Honna 1999: 96-100). Dengan kata lain tuduhan OTB membuka peluang dan pembenaran ke atas tindakan kekerasan negara.

Puncak dari kekerasan negara adalah berlakunya tragedi 27 Juli 1996, berbentuk penyerangan kantor pusat PDI yang dikuasai kelompok pro Megawati Soekarnoputri, oleh unsur-unsur yang digerakkan negara. Cribb (1996: 7-8)

menggambarkan tindakan ini sebagai rekayasa kotor yang dirancang secara cermat untuk menumpaskan pembangkang sekaligus memperkuat cengkeraman Orde Baru. Akan tetapi, dalam pandangan Tornquist (1996: 11-13) dan juga Winters (1996: 428-431), tindakan tersebut sesungguhnya merupakan kesalahan fatal yang tidak perlu berlaku, yang justru memperlihatkan ketidakmampuan Orde Baru dalam menangani konflik-konflik internal elite maupun kekuatan-kekuatan sosial baru, yang akibatnya pasti akan mempercepat kehancuran rejim.

Akibat dari kejadian tersebut, organisasi kiri mahasiswa, yaitu, PRD dituduh di sebalik kerusuhan. Tokoh-tokohnya, termasuklah organisasi massa yang berkait erat dengannya seperti: SMID, PPBI, Jakker dan STN terus diburu dan ditangkap. Bahkan, organisasi ini dituduh sebagai bentuk baru komunisme atau PKI, yang menggunakan “metode Komunis”, yang bermaksud menjatuhkan pemerintah. Sementara berbagai pimpinan kelompok mahasiswa yang lain yang bukan PRD diancam dan diinterogasi. Tindakan serupa juga dilakukan terhadap para pemimpin oposisi yang lain, seperti: Permadi, Megawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas (Partai Uni Demokrasi Indonesia), Muchtar Pakpahan (Serikat

Buruh Sejahtera Indonesia), Ridwan Saidi (Ketua Majelis Amanat Rakyat Indonesia) dan lain-lain (Muridan S. Widjojo 1999: 144).

Insiden di atas memukul gerakan mahasiswa dan kalangan aktivis prodemokrasi umumnya. Hampir seluruh aktivis mahasiswa ketakutan dan gerakan mereka merosot. Para aktivis takut menjadi sasaran penangkapan maupun penindasan pihak keamanan, sehingga lebih memilih diam sambil menunggu keadaan aman seperti semula. Karena itu, sebagian aktivis PRD secara sembunyi-sembunyi bergerak seraya berusaha memulihkan semula solidaritas anggotanya. Mereka bahkan terlibat dalam beberapa aktivitas protes sebelum dan sesudah pemilihan umum 1997 bersama kelompok mahasiswa lainnya. Mahasiswa melancarkan protes-protes untuk memboikot pemilu 1997, menganjurkan Golput, pencabutan paket 5 UU Politik, UU anti-Subversi dan Dwifungsi ABRI. Namun pihak tentara bertindak kasar dan melakukan penangkapan terhadap beberapa mahasiswa (Muridan S. Widjojo 1999: 149-152).

Menjelang Kejatuhan Rejim Orde Baru

Sampai sejauh itu, yakni tahun 1997, gerakan mahasiswa masih belum dapat memberikan tekanan yang signifikan,

apatah lagi memenangi taktik rejim. Gerakan mereka, sama dengan gerakan prodemokrasi yang lain, masih terpecah-pecah, baik oleh sentimen ideologi maupun konflik kepentingan organisasi serta tokoh-tokohnya. Meskipun keberagaman dalam tubuh gerakan mahasiswa telah mendorong membesarnya basis sokongan mahasiswa, namun juga mencetuskan perbedaan dan konflik internal.

Belum ada satupun kesepaduan gerakan mahasiswa dalam skop besar dan massif. Mereka hanya bersatu dalam isu-isu besar yang strategis, tetapi gagal memberikan respon terhadap isu-isu lokal yang sesungguhnya mempunyai dampak nasional. Selain dari itu, mayoritas mahasiswa masih diam, khususnya di perguruan-perguruan tinggi utama. Mereka sebagian besar apatis dan kurang berminat terhadap aktivisme politik. Gerakan mahasiswa lebih banyak didominasi universitas-universitas swasta yang lebih kecil dan kurang dikenali. Didirikannya universitas-universitas swasta baru dengan jumlah mahasiswa yang terus meningkat di seluruh negara, telah memberikan sumbangan penting kepada meningkatnya basis kritikal di kampus-kampus. Sebagian besar para mahasiswa itu, tumbuh sebagai intelektual proletariat atau semi proletariat yang nyaris tanpa kemahiran tertentu yang

sebenarnya sangat diperlukan negara. Golongan muda ini tumbuh sebagai kekuatan terpinggir yang kecewa terhadap sistem yang berlaku. Mereka inilah yang kemudian, untuk sebahagian, tampil sebagai aktivis penggerak dan menjadikan aktivitas gerakan mahasiswa sebagai pilihan hidup.

Sementara itu, pada pihak lain, kedudukan Orde Baru masih sangat kuat. Kekuatan tentara masih bersatu di belakang Presiden Soeharto. Pada tingkat tertentu, melalui manipulasi yang dilakukan, Orde Baru bahkan berhasil mengontrol ideologi dan wacana mahasiswa sehingga berhasil membelokkan arah tuntutan mereka. Karena itu, gerakan mahasiswa ibarat membentur tembok tebal kekuasaan yang tidak mungkin berhasil. Bahkan, tindakan rejim semakin brutal, ketika pada awal tahun 1998 beberapa aktivis mahasiswa diculik dan dibunuh. Momentum adanya satu gerakan mahasiswa dalam skop yang lebih besar, kuat dan tersebar, baru muncul setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997 semakin tidak teratasi. Bersama-sama dengan berbagai kelompok prodemokrasi, mahasiswa melancarkan tekanan terhadap rejim melalui rangkaian demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia yang berhujung

kepada kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998..

Mundurnya Presiden Soeharto membawa dampak yang luas pada kehidupan politik. Struktur politik Orde Baru yang monolitik dengan dominasi Golkar dan tentara juga runtuh. Begitu pula, institusi birokrasi pemerintah serta instrumen ideologi yang selama ini menjadi sarana penopang rejim, menghadapi gugatan rakyat. Beragam tuntutan muncul dari bawah. Akibatnya, serangkaian konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, yang diwarnai kekerasan segera meletus di berbagai daerah. Di sebaliknya, runtuhnya sistem politik Orde Baru dengan berbagai institusi dan simbol-simbol yang dibangunnya, telah memberikan angin segar pada tumbuhnya kebebasan di masyarakat.

Meskipun gerakan reformasi tidak sepenuhnya berhasil menyalakan seluruh warisan Orde Baru, namun nampak bahwa Orde Baru sebagai satu rejim yang kokoh dan dominan telah tercerai berai. Kegagalan rejim ini, sekaligus membuktikan bahwa kekuasaan, uang dan dominasi atas segala segi kehidupan tidak selalu menjadi faktor yang menentukan dalam merebut perhatian rakyat. Dalam konteks politik era pasca Orde Baru, dengan suasana euforia dan ledakan

partisipasi serta lahirnya aktor-aktor politik baru, kalangan aktivis mahasiswa dituntut untuk merumuskan peran baru mereka sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Kesimpulan

Pada dekade 1990-an gerakan mahasiswa ditandai dengan munculnya aktivitas-aktivitas protes menyangkut berbagai isu, mulai dari isu-isu domestik; khususnya isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia, maupun isu internasional. Mereka melakukan aliansi dengan kelompok-kelompok lain seperti; NGO, buruh, pers, serta kalangan oposisi di luar pemerintah. Gerakan mahasiswa menjadi bagian penting dari gerakan prodemokrasi pada saat itu. Pada masa yang sama sebagian gerakan mahasiswa mengalami radikalisasi yang ditandai dengan meningkatnya protes-protes mahasiswa di sejumlah daerah. Meningkatnya aktivitas-aktivitas protes mahasiswa tersebut berlaku karena disebabkan beberapa hal.

Pertama adalah, adanya keterbukaan politik. *Kedua*, meningkatnya perpecahan dan persaingan pada peringkat elite yang berkuasa. *Ketiga*, semakin banyaknya permasalahan dalam masyarakat sebagai dampak dari pembangunan. Meskipun demikian, gerakan mahasiswa pada saat itu masih

sporadis, terpecah-pecah, baik oleh sentimen ideologi maupun konflik kepentingan organisasi maupun tokoh-tokohnya. Selain itu, gerakan protes mahasiswa lebih independen, tanpa sokongan mana-mana pihak, serta tanpa aktor intelektual di mana gerakan mereka lebih banyak mengandalkan peranan jaringan (*networker*) anggota. Karena itu, rejim justru berhasil menundukkan mahasiswa dengan berbagai taktik, mulai dari merestrukturisasi semula organisasi internal mahasiswa di universitas melalui pendirian SMPT, disusul penerapan konsep *link and match* (ketersambungan dan keterpasangan) dalam dunia pendidikan, sampai kepada berbagai bentuk campuran seperti: pengawasan, ancaman dan penangkapan aktivis maupun akademisi.

Bahkan, pada peringkat tertentu, melalui berbagai taktik yang dilancarkan, Orde Baru berhasil mengontrol ideologi dan wacana mahasiswa, sehingga membelokkan arah tuntutan mereka. Puncak kekerasan negara terhadap masyarakat adalah berlakunya tragedi 27 Juli 1996, yang berbentuk penyerangan kantor pusat PDI yang dikuasai kelompok pro Megawati Soekarnoputri, oleh unsur-unsur yang digerakkan negara. Insiden tersebut memberikan pukulan telak terhadap gerakan mahasiswa dan kalangan

aktivis prodemokrasi amnya. Hampir seluruh aktivis mahasiswa ketakutan dan gerakan mereka merosot. Gerakan mahasiswa baru dapat bangkit kembali ketika krisis ekonomi dari tahun 1997 tidak teratasi, sehingga mengakibatkan demonstrasi di mana-mana. Para aktivis mahasiswa secara terus menerus melakukan demonstrasi di seantero negeri yang berujung pada kejatuhan Presiden Soeharto dari kekuasaan pada bulan Mei 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. 1993. *Student dissent in Indonesia in the 1980s. Working Paper 79*. Clayton Victoria: The Centre of Southeast Asian Studies Monash University.
- Aspinall, E. 1995. *Student and the military: regime friction and civilian dissents in the late Suharto period. Indonesia* 59(April): 21-44.
- Aspinall, E. 1999. *The Indonesian student uprising of 1998*. Dlm. Arief Budiman, Barbara Hatley, & Damien Kingsbury (pnyt.). *Reformasi: crisis and change in Indonesia*, hlm. 26-44. Clayton: Monash Asian Institute.
- Aspinall, E. 2005. *Opposing Suharto: compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford, California: Stanford University Press.

- Aspinall, E. 2012. Indonesia: moral force politics and the struggle against authoritarianism. Dlm. Weiss, M. & Aspinall, E. (pnyt.). 2012. *Student activism in Asia: between protest and powerlessness*, hlm. 153-180. Minnesota: The University of Minnesota Press.
- Arbi Sanit. 1989. *Mahasiswa, kekuasaan dan bangsa: refleksi dan gagasan alternatif*. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia dan Yayasan LBH Indonesia.
- Arbi Sanit. 1999. *Pergolakan melawan kekuasaan: gerakan mahasiswa antara aksi moral dan politik*. Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar.
- Cribb, R. 1996. Megawati and the PDI affair: implications for Indonesian politics. *NIASnytt* 3: 7-8.
- Davis, Michael C. 2015. Hong Kong's umbrella movement: Beijing's broken promises. *Journal of Democracy*, Vol. 26, No. 2(April):101-110.
- Editor*. 1993. 10 Juli.
- Forum Keadilan*. 1993. 28 Oktober.
- Forum Keadilan*. 1994. 3 Februari.
- Goodwin, J., & Jasper, J.M. 2009. *The social movement reader: Cases and concepts*. Maiden, MA: Blackwell.
- Halili, "Menyelamatkan Gerakan Mahasiswa", *Kompas*, 12 Januari 2016.
- Human Rights Watch. 1998. *Academic freedom in Indonesia: dismantling Soeharto-era barriers*. New York: Human Rights Watch.
- Honna, J. 1999. Military ideology in response to democratic pressure during the late Suharto era: political and institutional contexts. *Indonesia*, 67 (April): 77-126.
- Irenewati H. Gayatri. 1999. Arah baru perlawanan: gerakan mahasiswa 1989-1993. Dlm. Muridan S. Widjojo (pnyt.). *Penakluk rezim orde baru: gerakan mahasiswa '98*, hlm. 64-125. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kompas*. 1993. 27 November.
- Lane, Max, *Unfinished nation: Ingatan revolusi, aksi massa, dan sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe, 2014
- Media Dakwah*. 1991. Januari.
- Media Dakwah*. 1995. Juli.
- Media Dakwah*. 1995. September.
- Miftahuddin. 2004. *Radikalisasi pemuda: PRD melawan tirani*. Depok: Desantara.
- Muridan Satrio Widjojo. 1999. 'Turunkan harga, atau kami turunkan kamu ...' gerakan mahasiswa menggulingkan Soeharto. Dlm. Muridan S. Widjojo (pnyt.). *Penakluk rezim orde baru: gerakan mahasiswa '98*, hlm. 143-176. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Naipospos, B.T. 1996. Mahasiswa Indonesia dalam panggung politik: ke arah gerakan rakyat?. *Prisma* 7: 17-33.
- Pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan*

- tinggi*. 1990. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Rowen, Ian. 2015. Inside Taiwan's sunflower movement: Twenty-Four days in a student-occupied parliament, and the future of the region. *The Journal of Asian Studies*, Vol. 74, No. 1(February):5-19.
- Tempo*. 1992. 28 November.
- Tempo*. 1993. 7 Agustus.
- Tornquist, O. 1990. Rent capitalism, state, and democracy: a theoretical proposition. Dlm. Budiman, Arief (pnyt.). *State and civil society in Indonesia*, hlm. 53-66. Clayton Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University.
- Tornquist, O. 1996. From new to human order in Indonesia? *NIASnytt* 3: 11-13.
- Uhlin, A. 1998. *Oposisi berserak: arus deras demokratisasi gelombang ketiga di Indonesia*. Terj. Rofik Suhud. Bandung: Mizan.
- Weiss, Meredith L. 2011. *Student activism in Malaysia: Crucible, mirror, sideshow*. Singapore: NUS Press.
- Winters, J.A. 1996. Uncertainty in Suharto's Indonesia. *Current History* Vol. 95, No. 605(December): 428-431.
- Wright, David Curtis. 2014. Chasing sunflowers: Personal firsthand observations of the student occupation of the legislative yuan and popular protests in Taiwan, 18 March – 10 April 2014. *Journal of Military and Strategic Studies*. Vol/ 15, Issue 4: 134 -148.